

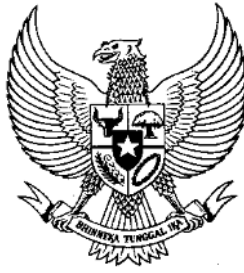


**PEMERINTAH
KABUPATEN
BELITUNG**

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA- PD) TAHUN 2025-2029

**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG**





BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

9. Peraturan....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan

Rencana....

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB....

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan.
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat.
- c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.
- d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

- (1) Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung;
 - 2. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung;
 - 3. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Belitung;
 - 4. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung;
 - 5. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung;
 - 6. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung;
 - 7. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung;
 - 8. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
 - 9. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung;
 - 10. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;

11. Rencana....

11. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
12. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung;
13. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
14. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung;
15. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
16. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung;
17. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian Kabupaten Belitung;
18. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;
19. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Belitung;
20. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung;
21. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung;
22. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung;
23. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung;
24. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung;
25. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung;
26. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung;
27. Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpandan;
28. Rencana Strategis Kecamatan Badau;
29. Rencana Strategis Kecamatan Sijuk;
30. Rencana Strategis Kecamatan Membalong;
31. Rencana Strategis Kecamatan Selat Nasik;

(3)Renstra....

- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

 
WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004

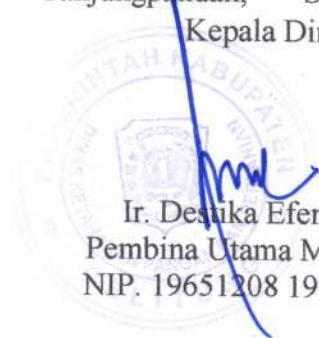
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja dan program/kegiatan/sub kegiatan selama 5 (lima) tahun dalam periode 2025-2029. Diharapkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini dapat menjadi acuan kerja yang jelas dalam pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yang Maju, Inovatif dan Berkelanjutan.

Tanjungpandan, September 2025

Kepala Dinas,



Ir. Deslika Efenly, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651208 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR DIAGRAM.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.3.1 Maksud.....	12
1.3.2 Tujuan.....	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	16
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	16
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	25
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia.....	25
2.1.2.2 Sumber Daya Aset/Modal.....	28
2.1.2.3 Sumber Daya Lainnya.....	29
2.1.3 Kinerja Pelayanan Daerah.....	31
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	37
2.1.5 Mitra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Pemberian Layanan	39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	46
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	48
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	50
BAB V PENUTUP.....	100
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	25
Tabel 2.2.	Jumlah SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024.....	27
Tabel 2.3.	Rincian SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berdasarkan Golongan dan Pangkat Tahun 2024.....	27
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 yang telah mengikuti Diklat.....	28
Tabel 2.5.	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan Tahun 2024.....	29
Tabel 2.6.	Data Prasarana Pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	30
Tabel 2.7.	Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung.....	31
Tabel 2.8.	Data Luas Tanaman, Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman Sayuran dan Buah Tahun 2024.....	33
Tabel 2.9.	Data Luas Tanaman, Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan Tahun 2024.....	34
Tabel 2.10.	Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Karet Tahun 2024.....	34
Tabel 2.11.	Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Lada Tahun 2024.....	34
Tabel 2.12.	Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2024.....	35
Tabel 2.13.	Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Kelapa Tahun 2024.....	35
Tabel 2.14.	Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Aren Tahun 2024.....	35
Tabel 2.15.	Populasi Ternak di Kabupaten Belitung.....	36
Tabel 2.16.	Data Kelembagaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024.....	37
Tabel 2.17.	Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.....	37
Tabel 2.19.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	41
Tabel 2.20.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	44
Tabel 3.1.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran PD.....	47
Tabel 3.2.	Penetapan Strategi Renstra PD.....	48
Tabel 3.3.	Perumusan Arah Kebijakan Renstra DKPP.....	48
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD.....	57
Tabel 4.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan.....	76
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.....	93
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama PD.....	97
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Penyusunan Renstra.....	3
Gambar 1.2. Hubungan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	4
Gambar 2.1.Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil FGD Penentuan Program Prioritas

Lampiran 2. Penentuan Target IKP Kabupaten Belitung

Lampiran 3. Tabel Perhitungan Baseline dan Target Peningkatan Produksi (dalam kg)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan tahunan. Di tingkat kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan di tingkat perangkat daerah terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi perangkat daerah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah, acuan

dalam pembuatan rencana kerja, menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi, serta untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

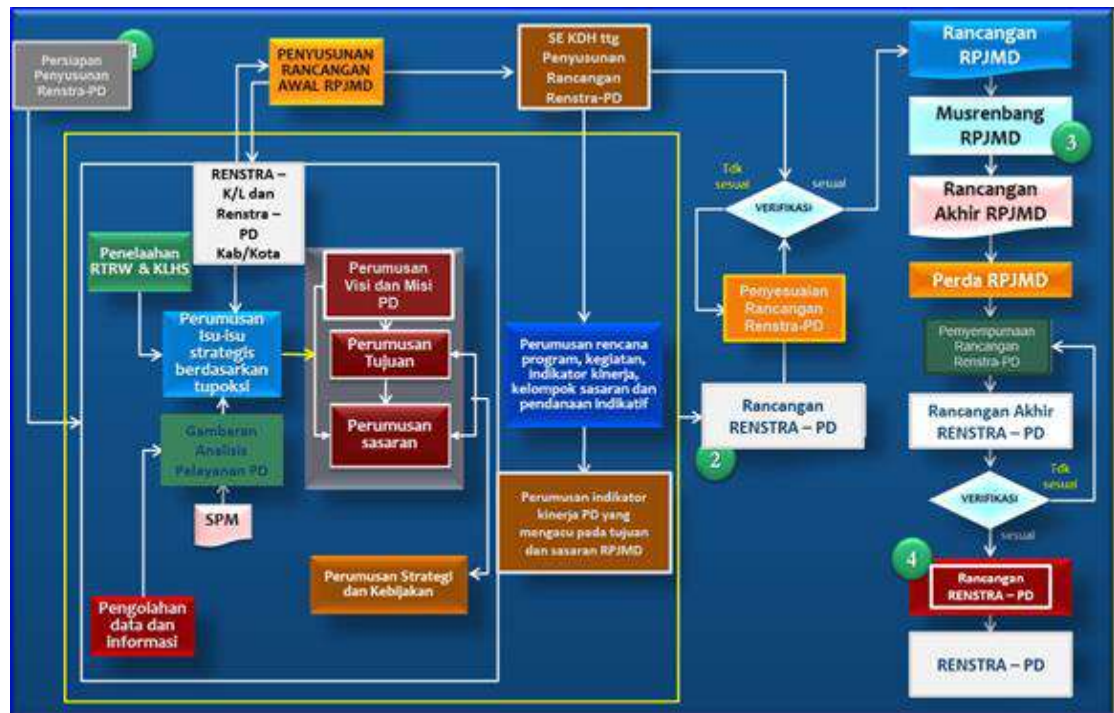
Renstra Dinas Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 disusun sebagai tindak lanjut dari ditetapkanannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam periode lima tahun kedepan supaya selaras dengan target dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitung, serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik, politis dan partisipatif serta menerapkan prinsip perencanaan secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, maka Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD. Dalam hal ini Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung disusun untuk

digunakan pada masa transisi perencanaan selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

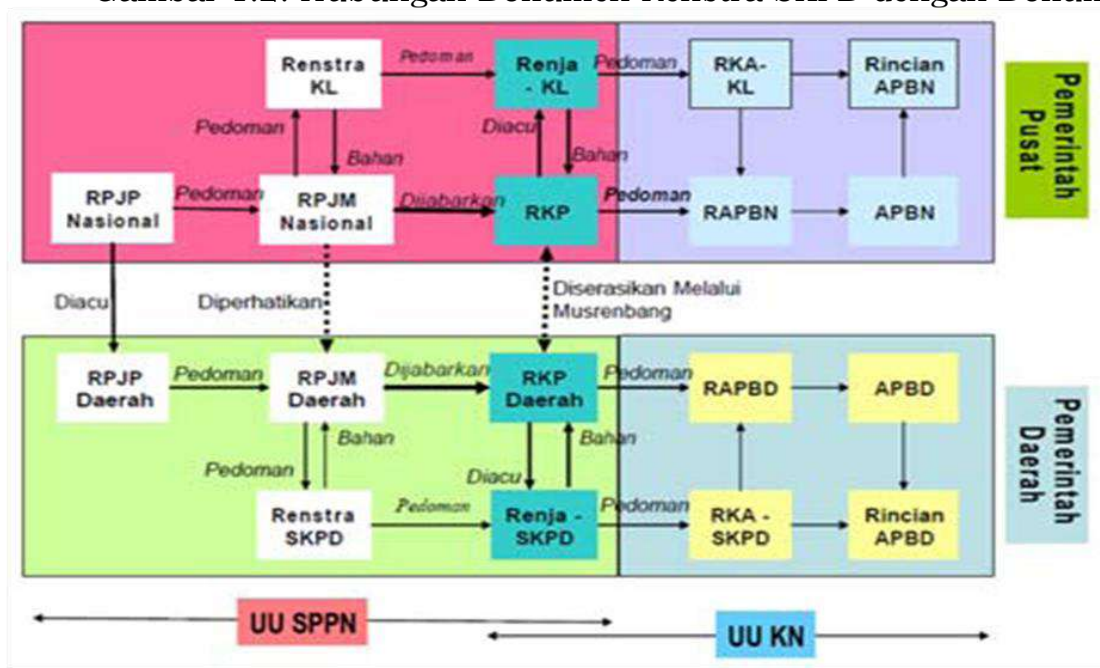
Gambar 1.1. Bagan Penyusunan Renstra



Keterkaitan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut: bahwa dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mempedomani RPJMD dimana RPJMD Kabupaten harus mempedomani dan diselaraskan dengan RPJMN, dimana RPJMN merupakan pedoman bagi K/L dalam menyusun Renstra K/L.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Renja-PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Skema hubungan perencanaan dan Anggaran dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen



Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun (2025-2029). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan ketahanan pangan dan pertanian selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini dijadikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Dalam tatanan operasional setiap tahunnya maka Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan dijabarkan

dalam Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan setelah diselaraskan dengan aspirasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4660;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5068;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613;
 11. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 12. Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 14. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68856);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5185;
20. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
27. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
28. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311;
29. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162 ;
30. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57;
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

32. Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
33. Permentan Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288;
35. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124;
36. Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836;
37. Peraturan Menteri Pertanian No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038;
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 558;

40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7;
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
43. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
49. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2025 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034, (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah

- Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 58);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 61);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 1);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11);
57. Peraturan Bupati Belitung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 86).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029 adalah untuk :

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029.

- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
- d. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
- e. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung adalah:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai institusi teknis urusan pangan dan pertanian dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;
3. Merumuskan rencana kerangka pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

5. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Selain itu, bab ini juga memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung tahun 2025-2045, telaahan renstra K/L dan renstra perangkat daerah provinsi, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini memuat uraian Program, uraian Kegiatan, uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55). Dinas Ketahanan dan Pertanian Kabupaten Belitung dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian. Dinas Ketahanan dan Pertanian Kabupaten Belitung dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 86), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung



Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung terdiri atas:

a. Kepala Dinas

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung. Sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;

2. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta prasarana dan sarana pertanian;
3. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ASN, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4. koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
6. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
2. penyusunan program, koordinasi, pengaturan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
3. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
4. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

5. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
6. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
8. pelaksanaan koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan kerawanan pangan;
9. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
10. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
2. penyusunan program, koordinasi, pengaturan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

4. penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
5. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
6. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
8. pelaksanaan pemberian informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
9. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
10. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
2. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
3. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
4. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

5. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
6. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
7. pelaksanaan bimbingan teknis pembiayaan pertanian;
8. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
9. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan usaha;
10. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
11. monitoring dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
12. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
2. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
3. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
4. pengawasan peredaran dan mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

5. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
6. pengendalian, penanggulangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
7. pemberian bimbingan paska panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
9. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
10. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang perkebunan. Bidang perkebunan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
2. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
3. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
4. pengawasan peredaran dan mutu benih di bidang perkebunan;

5. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
6. pengendalian, penanggulangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
7. pemberian bimbingan paska panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
8. pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang perkebunan;
9. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan;
10. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring serta evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
2. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
3. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
4. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
5. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

6. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
7. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak dan obat hewan;
8. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
9. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
10. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
11. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
12. pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis baik milik pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang peternakan;
13. pelaksanaan pemetaan sentra-sentra komoditas peternakan;
14. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
15. monitoring dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
16. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
17. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perbibitan

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perbibitan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung di atur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 54 Tahun 2017 dimana UPT Perbenihan dan Perbibitan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan

dan perbibitan. UPT Perbenihan dan Perbibitan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
2. pengelolaan dan pengembangan produksi tanaman dan ternak di lingkup UPT Perbenihan dan Perbibitan;
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Perbenihan dan Perbibitan;
4. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dalam memberikan pelayanan adalah sumber daya manusia; prasarana dan sarana. Sumber daya manusia sebagaimana tertera pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Bidang/UPT	Lk	Pr	Ket
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas	1		
2.	Sekretaris	1		
	1. Subbag Kepegawaian dan Umum	1		
	2. Fungsional Arsiparis		1	
	3. Fungsional Analis Kepegawaian		1	
	4. Fungsional Pranata Komputer			Belum ada
	5. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah		1	
	6. Fungsional Umum	2	2	
	PPPK	1	2	
2.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan		1	
	Fungsional Analis Ketahanan Pangan	1	1	

	Fungsional Umum	2		
3.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan			Belum ada
	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan		1	
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1	1	
	Fungsional Umum		1	
4.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan		1	
	Fungsional Penyuluh Pertanian	27	13	
5.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		1	
	Fungsional Pengawas Benih Tanaman		1	
	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	1		
	Fungsional Umum		2	
6.	Kepala Bidang Perkebunan		1	
	Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian	1		
	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	1		
	Fungsional Umum	3		
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			Belum ada
	Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian		1	
	Fungsional Medik Veteriner		2	
	Fungsional Paramedik	1		
	Fungsional Pengawas Bibit Ternak	3	1	
	Fungsional Pengawas Mutu Pakan	1		
	Fungsional Umum	2		
8.	UPT Perbenihan dan Perbibitan	1		
	Kasubbag TU UPT Perbenihan dan Perbibitan	1		
Jumlah		52	35	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Perbandingan pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan adalah 52 : 35 atau dapat dikatakan bahwa 40,23% (empat puluh koma dua tiga) pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung adalah perempuan. Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024

Rincian	Jumlah PNS		Jumlah P3K		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Gol. IX			3	2	5
Gol. VII			1	2	3
Gol. V			9	2	11
Gol. IV	3	4			7
Gol. III	33	25			58
Gol. II	3	0			3

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung apabila berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III yaitu sebesar 66,67% (58 orang) dilanjutkan oleh golongan V sebesar 12,64% (11 orang); golongan IV sebesar 8,05% (7 orang); golongan IX sebesar 5,75% (5 orang); golongan VII dan golongan II masing-masing sebesar 3,44% (3 orang). Rincian berdasarkan golongan dan Pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rincian SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir Tahun 2024

Golongan PNS/P3K	Pendidikan Terakhir							
	S2		S1/D4		D3		SMA	
	L	P	L	P	L	P	L	P
P3K Gol. IX			3	2				
P3K Gol. VII					1	2		
P3K Gol. V							9	2
PNS Gol. IV	1		2	4				
PNS Gol. III	1	3	21	20	5	2	6	
PNS Gol. II					2		1	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung mayoritas berpendidikan D4/S1 yaitu sebanyak 52 orang atau sebesar 59,77% dari jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, disusul dengan 20,69% berpendidikan SLTA (18 orang dari 87 orang), 13,79% berpendidikan D3 (12 orang dari 87 orang) dan 5,75% berpendidikan S2 (5 orang dari 87 orang).

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang telah mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai	Pegawai yang telah mengikuti dan lulus	Pegawai yang belum mengikuti
1.	Pelatihan Kepemimpinan Tk. II	1	1	
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	5	3	2
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	3	1	2
4.	Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian	21	18	3
5.	Diklat Dasar Fungsional Medik Veteriner	2	2	
6.	Diklat Dasar Fungsional Paramedik	1	1	
7.	Diklat Dasar Pengawas Bibit Ternak	4	2	2
8.	Diklat Dasar Pengawas Mutu Pakan	1	1	
9.	Diklat Dasar Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman	3	2	1
10.	Diklat Dasar Arsiparis	1	1	
11.	Diklat Dasar Analisis Sumber Daya Manusia dan Aparatur	1	1	
12.	Diklat Dasar Fungsional Perencana	-	-	
13.	Diklat Dasar Fungsional Pengawas Benih Tanaman	1	1	
14.	Diklat Dasar Fungsional Pengawas Alsintan	-	-	
15.	Diklat Dasar Fungsional Analisis Ketahanan Pangan	2		2
16.	Diklat Dasar Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2		2
17.	Diklat Dasar Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian	2		2
18.	Diklat Barang dan Jasa	36	18	18

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

2.1.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Kondisi aset/modal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan Tahun 2024

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1.	TANAH	21
2.	PERALATAN DAN MESIN	
	a. Alat Besar	10
	b. Komputer	94
	c. Alat Angkutan	56
	d. Alat Bengkel dan Alat Ukur	54
	e. Alat Pertanian	193
	f. Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.754
	g. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	45
	h. Alat Kedokteran dan Kesehatan	126
	i. Alat Laboratorium	2.754
	j. Alat Persenjataan	2
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
	a. Bangunan Gedung	86
	b. Bangunan Menara	1
	c. Tugu Titik Kontrol/Prasasti	2
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
	a. Jalan dan Jembatan	84
	b. Bangunan Air	81
	c. Instalasi	12
	d. Jaringan	8
5	ASET TETAP LAINNYA	
	a. Bahan Perpustakaan	4
	b. Hewan	34
	c. Tanaman	1
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	2

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Belitung Tahun 2024

2.1.2.3. Sumber Daya Lainnya

Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa. Luas wilayah Kabupaten Belitung 229.369 hektar dengan perincian penggunaan lahan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Lahan sawah : 1.015,39 ha

Lahan bukan sawah : 188.500 ha

Lahan bukan pertanian: 39.853,61 ha

Total Luasan (lahan sawah + lahan bukan sawah + lahan bukan pertanian) : 229.369 ha

Tabel 2.6. Data Prasarana Pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Prasarana Pertanian	Lokasi	Jumlah
1.	Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Perawas, Sijuk, Tanjung Rusa dan Badau	4 unit
2.	Rumah Rice Milling Unit (RMU)	Sijuk, Air Merbau, Air Saga, Kacang Butor, Cerucuk, Bantan, Simpang Rusa, Kembiri, Perpat	9 unit
3.	Lumbung Pangan	Bantan, Simpang Rusa, Air Gede	3 unit
4.	Rumah Bengkel ALSINTAN	UPJA Kremak Jaya desa Perpat	1 unit
5.	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Pangkallalang, Perawas, Sungai Padang, Badau, Kacang Butor, Simpang Rusa, Kembiri, Tanjung Rusa, Membalong	10 unit
6.	Gudang Benih	Perpat, kembiri, Simpang Rusa	3 unit
7.	Gudang ALSINTAN	UPJA Kremak Jaya desa Perpat	1 unit
8.	Lantai Jemur	Air Merbau, Cerucuk, Kacang Butor, Bantan, Simpang Rusa, Kembiri, Perpat	7 unit
9.	UV Dryer	Perawas	1 unit
10.	Embung	Perawas, Juru Sebrang, Kacang Butor, Air batu Buding, Cerucuk, Ibul, Badau, Air Selumar, Batu Itam, Keciput, Sijuk, Sungai Padang, Air Seruk, Simpang Rusa, Air Gede, Lassar, Tanjung Rusa, Mentigi, Gunung Riting, Bantan, Perpat, Padang Kandis, Membalong	40 unit
11.	DAM Parit	Perawas, Juru Sebrang, Kacang Butor, Cerucuk, Ibul, Badau, Air Selumar, Keciput, Sijuk, Sungai Padang, Simpang Rusa, Tanjung Rusa, Mentigi, Bantan, Perpat, Padang	33 unit

		Kandis, Membalong	
12.	Jalan Usaha Tani	Perawas, Juru Sebrang, Kacang Butor, Cerucuk, Ibul, Air Selumar, Batu Itam, Sijuk, Simpang Rusa, Kembiri, Lassar, Tanjung Rusa, Mentigi, Gunung Riting, Bantan, Perpat, Padang Kandis	24 unit
13.	Jalan Produksi	Air Seruk, Membalong	3 unit
14.	Jaringan Irigasi Sumur Air Dangkal	Perawas, Membalong	2 unit

Sumber : Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang ada di Kabupaten Belitung seluas 2.000 Ha untuk lahan sawah dan 3.000 Ha untuk lahan kering, namun hanya sebagian kecil saja yang telah dimanfaatkan untuk areal pertanian.

Tabel 2.7. Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung

No	Penggunaan Lahan	Realisasi dalam satu tahun					Jumlah (ha)
		Ditanami Padi			Tidak ditanami padi		
		Satu kali	Dua kali	≥ Tiga kali	Ditanami tanaman lain	Tidak ditanami apapun	
1.	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	50,49	208		126	563,87	948,36
	b. Tadah Hujan	4,00			8	55,03	67,03
	c. Rawa Pasang Surut	-					
	d. Rawa Lebak	-					
	Jumlah Lahan Sawah	54,49	208		134	618,90	1.015,39
2.	Lahan Pertanian Bukan Sawah						Luas (ha)
	a. Tegal/Kebun						10.922,7
	b. Ladang/Huma						9.176
	c. Perkebunan						55.343
	d. Hutan Rakyat						12.976
	e. Padang Penggembalaan/Rumput						421
	f. Hutan Negara						73.023
	g. Sementara tdk diusahakan						2.672
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan Negara dll)						23.967
	Jumlah Lahan Bukan Sawah						188.500
3.	Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Pemukiman, perkantoran, sungai dll)						39.853,3
	Total Luasan = Lahan Sawah + Lahan Bukan Sawah + Lahan Bukan Pertanian						229.369
4.	Luas Wilayah Kecamatan						229.369

Sumber : Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024

Jenis tanaman pangan yang banyak diusahakan masyarakat meliputi padi, dan ubi kayu (singkong). Luas tanam padi sawah pada tahun 2024 mencapai 326,1 Ha dengan produksi sebesar 870,20 ton, luas panen sebesar 238,3 ha dengan produktifitas rata-rata padi sebesar 3.65 ton/ha tersebar di Kecamatan Tanjungpandan, Badau, Sijuk dan Membalong. Selain tanaman pangan, Kabupaten Belitung juga mempunyai potensi tanaman hortikultura buah-buahan dan sayur-sayuran. Tanaman buah-buahan seperti manggis, nanas, durian, rambutan dan mangga sedangkan untuk komoditas sayuran seperti cabai dan sayuran lainnya. Pada tanaman buah-buahan sistem budidaya dilakukan oleh masyarakat secara konvensional, sedangkan untuk sayuran sebagian besar petani sudah menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) dan beberapa petani sudah mendapat jaminan mutu (prima 3 dan organik), Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 472 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kabupaten Belitung masuk dalam kawasan lada dan cabai. selain sektor Pangan dan Hortikultura, sektor peternakan dan perkebunan juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan di Kabupaten Belitung.

Potensi Sumber Daya Alam (lahan dan agroklimat) untuk komoditas yang lain juga cukup menjanjikan sebagai sarana untuk pelaksanaan pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik. Ada beberapa komoditas perkebunan yang potensial untuk dikembangkan yaitu lada sebagai komoditas unggulan daerah, karet dan sawit sebagai komoditas strategis, serta aren yang saat ini tengah dikembangkan.

Khusus mengenai lada yang merupakan produk unggulan daerah terus dilakukan upaya dalam peningkatan produksi lada baik melalui intensifikasi maupun rehabilitasi, selain intensifikasi dan rehabilitasi juga dikembangkan mengenai pengolahan pasca panen antara lain dengan adanya bantuan bak perendaman, mesin pengupas dan pencuci, mesin penepung. Selain itu, pada periode Renstra 2024-2029, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merencanakan untuk membuat kebun induk lada di

lahan UPT Perbenihan dan Perbibitan Badau. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung Program Bupati terpilih yang ingin megembangkan produk andalan Belitung ini. Produk perkebunan selain lada yaitu aren, dalam perkembangannya gula aren sudah dilakukan pengolahan yaitu dibuat menjadi gula semut sehingga harga jual dari gula tersebut akan meningkat.

Tabel 2.8. Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman Sayuran dan Buah Tahun 2024

No	Komoditas	Luas		Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)
		Tanaman (ha)	Panen (ha)		
	SAYURAN				
1.	Kubis	0	0	0	0
2.	Petsai / Sawi	38,60	38,40	77,67	2,02
3.	Tomat	6,00	5,20	26,11	5,02
4.	Bawang Daun	8,90	7,00	9,56	1,37
5.	Wortel	0	0	0	0
6.	Lobak	0	0	0	0
7.	Buncis	2,20	1,95	9,60	4,92
8.	Kangkung	68,00	62,80	202,40	3,22
9.	Bayam	52,90	49,70	103,60	2,08
10.	Kacang Panjang	32,30	37,70	120,90	3,21
11.	Terong	7,90	9,56	58,90	6,16
12.	Cabe Besar/keriting	20,60	30,40	156,87	5,16
13.	Cabe Kecil/Rawit	31,80	45,96	171,50	3,73
	JUMLAH	269,20	288,67	937,11	3,25
	BUAH-BUAHAN				
1.	Nangka	69,77	18,27	87,00	4,76
2.	Duku/Langsar/Kokosan	67,38	30,60	72,30	2,36
3.	Durian	258,11	76,72	267,50	3,49
4.	Jambu Air	19,45	4,31	81,70	18,96
5.	Jeruk Siam/Keprok	27,42	3,41	48,80	14,30
6.	Jeruk Besar	1,45	0,72	6,40	8,93
7.	Mangga	180,33	63,84	210,9	3,30
8.	Manggis	430,00	185,51	202,20	1,09
9.	Nenas	56,02	22,83	807,50	35,37
10.	Pepaya	1,28	0,73	46,10	63,15
11.	Pisang	10,87	5,11	133,90	26,23
12.	Rambutan	216,82	73,06	82,20	1,13
13.	Salak	4,83	3,30	177,90	53,94
14.	Sawo	13,48	4,85	78,70	16,23
15.	Sirsak	2,20	0,89	9,25	10,43
16.	Melinjo	44,08	15,71	67,30	4,29
17.	Petai	30,02	4,20	34,50	8,21
18.	Jengkol	12,65	7,07	44,70	6,32
19.	Alpukat	9,99	4,13	25,75	6,23
	JUMLAH	1.456,16	525,24	2.484,60	4,73

Sumber : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Tabel 2.9. Data Luas Tanaman, Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan Tahun 2024

No	Komoditas	Luas		Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)
		Tanaman (ha)	Panen (ha)		
1.	Padi Sawah	229	471	1.538,20	3,27
2.	Padi Ladang	5	19	38,20	2,01
3.	Ubi Kayu	71,40	78,50	1.120,10	14,27
4.	Ubi Jalar	14,20	15,10	44,10	2,92
5.	Kacang Tanah	45,30	44,20	65,70	1,49
6.	Jagung	55,70	52,40	467,30	8,92
7.	Kacang Kedelai	0	0	0	0
JUMLAH		420,60	680,20	3.273,60	4,81

Sumber : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Tabel 2.10. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Karet Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				
		TBM	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/ Rusak	Jumlah Areal	Jumlah Produksi (Ton)
1	Membalong	218	628	194	1.040	791,28
2	Tanjungpandan	91	90,60	32	213,60	104,19
3	Badau	405	89,20	53,00	547,20	129,34
4	Sijuk	42,50	485	181	708,50	606,25
5	Selat Nasik	396	251	99	746	353,91
Jumlah		1.152,50	1.543,80	559,00	3.255,30	1.984,97

Sumber : Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Tabel 2.11. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Lada Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				
		TBM	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/ Rusak	Jumlah Areal	Jumlah Produksi (Ton)
1	Membalong	864,00	3.045	1.414	5.323	3.410,40
2	Tanjungpandan	60	108,80	42	210,8	102,27
3	Badau	121,50	411,00	305,00	837,50	398,67
4	Sijuk	176,00	284,00	239,50	699,50	241,40
5	Selat Nasik	96,60	151,00	66,99	313,99	169,12
Jumlah		1.317,50	3.999,80	2.067,49	7.384,79	4.321,86

Sumber : Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Tabel 2.12. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				
		TBM	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/ Rusak	Jumlah Areal	Jumlah Produksi (Ton)
1	Membalong	3.948,20	1.629,00	168,20	3.948,20	7.248,87
2	Tanjungpandan	106,00	697,00	17,50	820,50	1.672,80
3	Badau	175,00	752,50	72,00	999,50	1.505,00
4	Sijuk	175,00	1.154,00	107,50	1.436,50	3.519,70
5	Selat Nasik	0	0	0	0	0
Jumlah		2.085,00	4.754,50	365,20	7.204,70	13.946,37

Sumber : Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Tabel 2.13. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Kelapa Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				
		TBM	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/ Rusak	Jumlah Areal	Jumlah Produksi Kopra (Ton)
1	Membalong	25,00	180,00	5,80	210,80	176,40
2	Tanjungpandan	69,00	129,00	76,60	274,60	43,86
3	Badau	138,90	106,00	136,50	381,40	129,32
4	Sijuk	78,00	141,00	334,00	553,00	155,10
5	Selat Nasik	45,00	62,00	8,25	115,25	37,82
Jumlah		355,90	618,00	561,15	1.535,05	542,50

Sumber : Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Tabel 2.14. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditas Aren Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				
		TBM	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/ Rusak	Jumlah Areal	Jumlah Produksi Gula Aren (Ton)
1	Membalong	85,00	221,00	15,50	321,50	685,10
2	Tanjungpandan	0	0	3,30	3,30	0
3	Badau	0,08	1,68	0,40	2,16	2,10
4	Sijuk	0	0	1,3	1,3	0,00
5	Selat Nasik	2,10	1,50	1,00	4,60	0
Jumlah		87,18	224,18	21,50	332,86	687,20

Sumber : Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Pada sektor peternakan potensi yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- Beternak merupakan bagian salah satu mata pencaharian masyarakat Belitung;
- Sumber daya manusia peternakan cukup tersedia;
- Permintaan produk peternakan tiap tahun cenderung meningkat;
- Limbah pertanian dan rumah tangga sebagai bahan pakan ternak cukup banyak tersedia;
- Penerapan konsepsi agribisnis mampu mendatangkan keuntungan maksimal;
- Jumlah populasi ternak di Kabupaten Belitung yang cenderung meningkat.

Tabel 2.15. Populasi Ternak di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Jenis Ternak	Populasi Ternak / Ekor (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sapi	1.802	1.830	850	858	845
2.	Kerbau	15	0	0	0	0
3.	Kuda	9	9	9	9	9
4.	Kambing	5.577	2.837	753	309	391
5.	Domba	57	46	0	0	0
6.	Babi	748	1.059	1.148	967	988
7.	Ayam Buras	37.575	67.971	110.690	166.171	201.889
8.	Ayam Ras Petelur	136.684	214.983	255.161	297.702	258.070
9.	Ayam Ras pedaging	3.628.368	4.487.638	3.672.014	3.113.067	2.698.116
10.	Itik	6.710	2.865	2.006	7.237	9.924
11.	Puyuh	1.197	1.854	2.115	5.423	6.132

Sumber : Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung

Secara umum, data tersebut diatas memperlihatkan terjadinya fluktuasi populasi ternak yang signifikan disebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat dari Tahun 2022. Sedangkan kenaikan populasi Ayam Buras, Itik dan Puyuh terjadi dikarenakan adanya peningkatan konsumsi masyarakat dan keberhasilan program dan kegiatan di bidang peternakan.

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Kabupaten Belitung sekitar 85% masih menggantungkan produk peternakan dari luar daerah. Secara umum perkembangan budidaya ternak di masyarakat khususnya sapi di Kabupaten Belitung tiap tahun mengalami peningkatan, tetapi kontribusi yang dapat dipenuhi ternak lokal hanya 15%, sehingga

potensi untuk usaha di bidang peternakan khususnya ternak sapi masih sangat baik. Populasi ternak unggas (baik ayam ras pedaging maupun petelur) mengalami kenaikan dan penurunan karena pengaruh biaya produksi dimana kebutuhan Day Old Chick (DOC) serta pakan masih didatangkan dari luar daerah.

Daya dukung sektor pertanian juga dapat dilihat dari kelembagaan petani dengan jumlah 381 kelompok tani (poktan) yang tergabung dalam 40 gabungan kelompok tani (gapoktan).

Tabel 2.16. Data Kelembagaan Pertanian Tahun 2024

No	Kecamatan	Kel Tani	Gapoktan	UPJA	Kelembagaan Ekonomi Petani	Kios Resmi Pupuk Subsidi	Distributor Resmi Pupuk
1.	Tanjungpandan	63	9	7	1	1	2
2.	Membalong	115	11	9	3	6	-
3.	Badau	63	7	4	1	3	-
4.	Sijuk	118	10	3	-	2	-
5.	Selat Nasik	22	3	-	1	2	-
	Jumlah	380	40	23	6	14	2

Sumber : Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung beserta besaran kebutuhan dan arah pengembangan pelayanan antara lain:

Tabel 2.17 Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

No	Jenis Pelayanan	Besaran Kebutuhan	Lokasi Pengembangan	Sasaran Pelayanan
1.	Penyediaan data harga kebutuhan pokok komoditi pertanian	Data harian, mingguan dan bulanan	Kabupaten Belitung	Masyarakat
2.	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Sesuai kebutuhan (bencana dan rawan pangan)	Daerah terdampak bencana dan daerah rawan pangan	Masyarakat
3.	Melakukan uji sampel komoditi pertanian dalam rangka menjamin keamanan pangan.	Enam belas kali dalam setahun	Kabupaten Belitung	Petani, Pedagang dan Masyarakat
4.	Pendataan pelaku usaha pangan segar dan sertifikasi prima 3	Sesuai kebutuhan	Kabupaten Belitung	Pelaku Usaha

5.	Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai Pola Pangan Harapan (PPH)	Sosialisasi	Kabupaten Belitung	Masyarakat
6.	Optimalisasi lahan sawah	80 ha/tahun	Kabupaten Belitung	Petani
7.	Penyediaan benih tanaman pangan, sarana prasarana beserta teknik budidayanya	900 ha	Kabupaten Belitung	Petani
8.	Penyediaan bibit tanaman hortikultura, sarana prasarana beserta teknik budidayanya	30 ha/tahun	Kabupaten Belitung	Petani
9.	Penyediaan bibit tanaman perkebunan, sarana prasarana beserta tehnik budidayanya	100 ha/tahun	Kabupaten Belitung	Petani
10.	Rekomendasi teknis Perkebunan meliputi : IUP, IUPP, IUPB dan STDB	-	Kabupaten Belitung	Petani
11.	Rekomendasi teknis Pangan meliputi : proses produksi; penanganan pasca panen, keterpaduan antara proses produksi dan penanganan pasca panen dan izin usaha perbenihan	-	Kabupaten Belitung	Petani dan Pelaku Usaha Pangan
12.	Rekomendasi teknis Hortikultura meliputi : IUB-Hortikultura, Izin Usaha Perbenihan Hortikultura	-	Kabupaten Belitung	Petani dan Pelaku Usaha
13.	Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	Setiap hari	Tanjungpandan	Masyarakat Veteriner
14.	Pelayanan penyuluhan pertanian	Setiap hari	Kabupaten Belitung	Petani
15.	Pelayanan kesehatan hewan ternak	Setiap hari	Kabupaten Belitung	Peternak
16.	Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)	Setiap hari	Tanjungpandan	Peternak dan Pelaku Usaha
17.	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	Sesuai kebutuhan	Kabupaten Belitung	Peternak

18.	Rekomendasi ternak dan produk peternakan	Sesuai kebutuhan	Kabupaten Belitung	Pelaku Usaha
19.	Sertifikat Veteriner	Sesuai kebutuhan	Kabupaten Belitung	Masyarakat
20.	Rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Setiap hari	Kabupaten Belitung	Petani

2.1.5. Mitra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Pemberian Pelayanan

Beberapa mitra dalam pelaksanaan pelayanan DKPP yaitu:

- Dalam hal perizinan usaha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerja sama dengan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUKM)
- Dalam pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan, DKPP bekerja sama dengan Perum BULOG.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pertanian dan pangan bertanggung jawab dalam perumusan konsep dalam penyelesaian masalah-masalah pertanian dan pangan dimasa sekarang dan yang akan datang dengan mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 serta memperhatikan aspirasi, kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu fungsi urusan pemerintahan

bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang mengandung permasalahan inti sebagai berikut.

1. Rendahnya Ketahanan Pangan di Belitung dimana Indeks Ketahanan Pangan Belitung pada Tahun 2024 hanya sebesar 62,34 yang diartikan bahwa daerah Belitung “cukup rentan pangan”. Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan sebesar 81,9 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masalah ketersediaan bukan menjadi masalah utama karena impor pangan bisa memenuhi konsumsi pangan. Hal ini menandakan masalahnya ada pada kurang optimalnya akses dan konsumsi pangan. Karena akses pangan yang dihitung dari persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga tanpa akses listrik dan persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan lebih dari 65% bukan kewenangan DKPP, masalah yang mungkin bisa diintervensi yaitu dari segi konsumsi pangan terutama keseimbangan pada kelompok pangan. Perhitungan Neraca Bahan Makanan menunjukkan bahwa tingkat konsumsi pangan hewani masyarakat Belitung melebihi konsumsi energi standar sedangkan untuk konsumsi pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih dibawah konsumsi energi optimal. Hal ini mungkin lebih mengarah pada preferensi masyarakat, dimana budaya masyarakat Belitung yang gemar mengkonsumsi ikan dan kurang menyukai sayur-sayuran. Beberapa solusi untuk mengatasi kondisi tersebut antara lain dengan melakukan sosialisasi penyusunan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman di tingkat Rumah Tangga, sosialisasi diversifikasi pangan lokal, serta sosialisasi gemar makan sayur dan buah di tingkat Pendidikan yang paling rendah
2. Belum optimalnya produksi sektor pertanian, masalah utamanya yaitu pada kurangnya jumlah petani dimana hanya sedikit masyarakat yang ingin berprofesi sebagai petani kecuali kondisi ekonomi seperti timah murah dan lingkungan tidak memungkinkan untuk menjadi penambang timah dan nelayan. Masalah ini bisa diatasi dengan penguatan kelembagaan petani, mengenalkan inovasi-inovasi pertanian pada generasi muda dan mengenalkan modernisasi pertanian pada

masyarakat. Adapun beberapa petani yang konsisten bertani memiliki masalah kandungan unsur hara tanah yang rendah (tanah di Belitung masuk dalam kategori lahan sub optimal sampai dengan marginal); benih (ketersediaan benih berlabel, bermutu yang disukai petani masih minim/susah diperoleh; adanya batasan-batasan dalam aturan perbenihan); pupuk (harga pupuk anorganik mahal; menemui kesulitan dalam hal penerapan rekomendasi pemupukan berimbang; sifat pupuk organik yang slow release); Dampak Perubahan Iklim (DPI), adanya curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan serangan hama penyakit blast, bercak coklat, hawar daun bakteri pada tanaman padi; hama penyakit embun bulu, layu fusarium, antraknosa, keriting, lalat buah pada tanaman cabai; hama penyakit busuk pangkal batang, penyakit kuning dan penggerek batang pada tanaman lada. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan bantuan sarana kepada petani, membantu pemeliharaan prasarana pertanian, membantu penerapan regulasi perizinan usaha pertanian serta melakukan penyuluhan pertanian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); Good Agriculture Practise (GAP); Good Handling Practise (GHP).

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas dan fungsi pelayanan daerah diidentifikasi beberapa permasalahan seperti pada tabel 2.19

Tabel 2.19 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Masih tersedianya lahan pertanian	Kurangnya minat masyarakat untuk berprofesi menjadi petani. Sebagian besar petani di Belitung hanya petani musiman yang berganti-ganti profesi sesuai dengan kondisi lingkungan.	Ancaman ketahanan pangan	Sertifikasi lingkungan dan sosial	Pencemaran tanah dan air dari pupuk dan pestisida	Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan tambang.	Rendahnya produksi pertanian menyebabkan Belitung cukup rentan pangan.

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kemampuan teknis dan manajerial petani/ kelembagaan petani;
2. Belum optimalnya produktivitas lahan;
3. Belum optimalnya tingkat kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi;
4. Belum terjaminnya ketersediaan benih/bibit pertanian secara 5 (lima) tepat (mutu, jenis, jumlah, waktu dan harga);
5. Fluktuasi harga produk pertanian;
6. Faktor sumber daya manusia yang belum mampu sepenuhnya untuk melaksanakan alih teknologi pertanian baik petugas teknis maupun petani;
7. Faktor permodalan yang menjadi kendala dalam meningkatkan skala usaha dan pendapatan.

b. Peluang

Peluang dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan teknologi, informasi dan komunikasi;
2. Program Strategis Pemerintah Pusat untuk mendukung Ketahanan Pangan seperti Brigade Pangan dan dana ketahanan pangan untuk desa;
3. Peningkatan kegiatan di sektor perdagangan dan jasa;
4. Tingkat konsumsi masyarakat cukup tinggi;
5. Permintaan ekspor produk pertanian cukup tinggi.

Tantangan dan peluang tersebut diatas akan diterjemahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.

Selain potensi dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, ada masalah yang harus segera diselesaikan dalam waktu cepat yaitu permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut masalah pertumbuhan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralihfungsinya lahan/komoditas pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha pertanian, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin.

Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Distribusi pangan di Kabupaten Belitung sangat di pengaruhi berbagai faktor seperti cuaca pada saat-saat tertentu yang tidak memungkinkan datangnya stok pangan sehingga sangat mengganggu aktifitas masyarakat. Kebutuhan pangan di Kabupaten Belitung sampai saat ini masih tergantung dengan daerah luar seperti produk beras, gula dan minyak goreng. Beras yang dikonsumsi masyarakat sampai saat ini masih dipasok dari luar daerah khususnya jawa sebesar 93,4% dari total kebutuhan pertahunnya.

Sampai saat ini konsumsi beras per kapita 84,6 Kg/Thn. Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, serta persaingan pemanfaatan sumber daya yang semakin ketat, maka dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini cukup memberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan berkelanjutan yang tertumpu pada sumberdaya wilayah lokal.

Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman adalah:

- Keterbatasan kemampuan ekonomi

- Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi
- Keterbatasan prasarana dan sarana untuk mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai alternatif pengganti beras (substitusi)
- Masih terdapatnya penyalahgunaan bahan kimia sebagai Campuran Bahan Makanan (CBM) berbahaya untuk pangan
- Pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor khususnya gandum
- Pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
- Pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggota keluarga

Tabel 2.20 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Rendahnya kualitas konsumsi pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan - Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan pelaku usaha pangan segar - Kurang optimalnya ketersediaan pangan di rumah tangga - Belum tersosialisasinya data dan informasi lokasi rentan rawan pangan
2	Belum optimalnya produksi sektor pertanian	Belum optimalnya produktivitas sektor pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengetahuan, minat petani dan penerapan teknologi pertanian yang masih rendah baik dari hulu ke hilir - Sarana produksi (Bibit/benih, pakan, pupuk) harganya relatif tinggi dan bergantung dari luar daerah

			<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana serta sarana pertanian- Sistem pengairan belum optimal- Alih fungsi lahan pertanian baik dari segi komoditas maupun fungsi pemanfaatan lahan
--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan **tujuan RPJMD yaitu “Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM” dengan sasaran “Menurunnya prevalensi stunting”**. Untuk mencapai sasaran tersebut digunakan strategi “Meningkatkan Status Gizi Masyarakat” dengan arah kebijakan meningkatkan pola hidup masyarakat dan menjaga asupan gizi dan keamanan pangan masyarakat. Adapun tujuan **“Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggul dan Potensial”** dengan **sasaran RPJMD “Meningkatnya pertumbuhan sektor prima” akan dicapai dengan melalui strategi “Penguatan Sektor Unggulan” dengan arah kebijakan “Meningkatkan produksi pertanian di kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) Selat Nasik dan kawasan strategis nasional di daerah lainnya”**. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dirumuskan dengan Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Menurunnya prevalensi stunting	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	62,34	62,64	62,94	63,23	63,53	63,83	64,13	Menggambarkan tingkat ketahanan pangan wilayah berdasarkan dimensi ketahanan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Energi Perkapita Per Tahun	948.080	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000	Target Ketersediaan Energi disesuaikan dengan Standar Nasional
Meningkatnya pertumbuhan sektor Prima			Rata-rata peningkatan produksi pertanian tahunan	2,22	10,05	10,61	10,78	8,95	7,89	7,19	Persentase peningkatan produksi pertanian dari tahun sebelumnya
		Meningkatnya produktivitas pertanian	Rata-rata peningkatan produktivitas pertanian tahunan	-9,12	13,22	2,88	2,86	2,83	2,80	2,78	Persentase peningkatan produktivitas pertanian (padi, cabai, sawit, lada, sapi dan ayam) dari tahun sebelumnya

Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dan meningkatnya produktivitas pertanian.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2 Penahapan Strategi Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Sektor Pertanian melalui inovasi dan mekanisasi pertanian.	Penguatan Perekonomian sektor pertanian dengan pemanfaatan potensi lokal dan ekonomi kreatif berbasis inovasi	Integrasi Daya saing Produk Hasil Pertanian, SDM, Transformasi Ekonomi Digital dan inovasi layanan publik untuk kesejahteraan	Akselerasi Pembangunan Sektor Pertanian guna mendukung Belitung maju, inovasi dan berkelanjutan	Konsolidasi Pembangunan Sektor Pertanian menuju perekonomian yang kuat dan masyarakat yang sejahtera

Arah kebijakan diperlukan untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berikut arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang diturunkan dari arah kebijakan RPJMD:

Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra DKPP

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERTANIAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sasaran : Menurunnya Prevelansi Stunting			
	Strategi 1.3 Meningkatkan layanan intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif dalam penanganan stunting			
		Meningkatkan intervensi konvergensi dengan kelompok sasaran : ibu hamil, nifas dan menyusui; anak usia 0 - 23 bulan; anak usia 24 - 59 bulan; Remaja Putri dan Catin;	Meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal	

		Komunitas dan Keluarga (rumah tangga dan masyarakat)		
			Meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan di desa rentan rawan pangan	
2	Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor Prima			
	Strategi Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan pelaku sektor unggulan	Modernisasi produksi, hilirisasi dan diversifikasi produk unggulan	Meningkatkan produksi pertanian dengan pemanfaatan teknologi, hilirisasi produk dan diversifikasi hasil petanian;	
		Penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pendukung sektor unggulan	Penguatan kelembagaan pertanian	
		Perluasan akses pasar dan pemasaran	Pengembangan usaha dan perluasan jaringan pemasaran produk hasil pertanian	
		Meningkatkan infrastruktur penunjang sektor unggulan	Pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian	

Dari tabel tersebut didapat arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dalam urusan Pangan yaitu Meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan Meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan di desa rentan rawan pangan. Sedangkan Arah Kebijakan dalam Urusan Pertanian yaitu Meningkatkan produksi pertanian dengan pemanfaatan teknologi, hilirisasi produk dan diversifikasi hasil petanian, Penguatan kelembagaan pertanian, Pengembangan usaha dan perluasan jaringan pemasaran produk hasil pertanian dan Pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki tanggungjawab melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dalam Renstra Dinas mengacu pada Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator capaian yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029.

A. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator program yaitu:

1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan.

Definisi operasional: $(\text{Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan} / \text{jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan}) \times 100\%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Persentase dokumen keuangan dan asset sesuai ketentuan.

Definisi operasional: (Jumlah dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan/jumlah dokumen keuangan dan aset yang direncanakan) x 100%

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator kegiatan yaitu: Dokumen keuangan Perangkat Daerah.

3. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat daerah

Definisi operasional: sesuai perhitungan rumusan Peraturan Kepala BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Indeks profesionalitas ASN sesuai dengan form pengukuran indeks profesionalitas ASN.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat daerah;

4. Survey Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.

Definisi operasional: Hasil survey kepuasan pegawai DKPP terhadap pelayanan administrasi perkantoran.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah;

5. Survey Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Definisi operasional: Hasil survey kepuasan pegawai DKPP terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kegiatan yaitu: Jenis Barang Milik Daerah;
- b) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kegiatan yaitu: Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran;

- c) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kegiatan yaitu: Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik;

A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan indikator program yaitu:

- Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi)
Definisi operasional: $(\text{Jumlah konsumsi energi per hari (KKal/kapita)} \div \% \text{AKE standar Nasional}) \times 100\%$
- Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (PPH Ketersediaan)
Definisi operasional: $(\text{Jumlah ketersediaan energi per hari (KKal/kapita)} \div \% \text{AKE standar Nasional}) \times 100\%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, indikator kegiatan yaitu: Dokumen Ketahanan Pangan;
 - b) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: Cadangan Pangan Daerah;
 - c) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan indikator kegiatan yaitu: dokumen penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal.
 - d) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, indikator kegiatan yaitu: Konsumsi pangan perkapita/tahun.
- B. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan indikator program yaitu:
- Persentase (%) Daerah Rentan Rawan Pangan
Definisi operasional: $(\text{Jumlah desa rentan rawan pangan} \div \text{jumlah seluruh desa}) \times 100\%$

- Definisi operasional: $(\text{Jumlah desa rentan rawan pangan yang diintervensi} / \text{Jumlah desa rawan pangan}) \times 100\%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, indikator kegiatan yaitu: Peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
- b) Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota

- C. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan indikator program yaitu: Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan.

Definisi operasional: $(\text{jumlah sampel dengan hasil uji negatif} / \text{total jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

- D. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan indikator program yaitu:

- Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Definisi operasional: jumlah produksi tanaman padi dan jumlah produksi tanaman cabai pada tahun berjalan di Kabupaten Belitung.

- Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan

Definisi operasional: jumlah produksi tanaman lada dan jumlah produksi tanaman sawit pada tahun berjalan di Kabupaten Belitung

- Jumlah Produksi Komoditas Peternakan

Definisi operasional: jumlah produksi sapi dan jumlah produksi

ayam pada tahun berjalan di Kabupaten Belitung

- Persentase Pendampingan Kelompok Tani yang menerima Sarana Pertanian

Definisi operasional: jumlah kelompok tani yang menerima sarana pertanian/jumlah pendampingan kelompok tani yang menerima sarana pertanian x 100%

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, indikator kegiatan yaitu: Jumlah sarana pertanian yang diberikan;
- b) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: benih dan bibit pertanian;
- c) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: bibit sapi;
- d) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, indikator kegiatan yaitu: bibit ternak unggas.

E. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan indikator program yaitu:

1. Persentase Luas Lahan Pertanian yang dikelola;

Definisi operasional: (jumlah lahan sawah yang digunakan dibagi total jumlah lahan sawah) x 100%

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengembangan Prasarana Pertanian, indikator kegiatan yaitu: Prasarana pertanian yang digunakan;
2. Persentase prasarana peternakan yang terkelola
Definisi operasional: (Jumlah prasarana peternakan dalam kondisi baik dibagi jumlah prasarana peternakan) x 100%
3. Luas Areal Perkebunan yang Mendapatkan Pendampingan

Definisi operasional: Total luas areal perkebunan yang sudah mendapatkan pendampingan STDB dan ISPO

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengembangan Prasarana Pertanian, indikator kegiatan yaitu: Jumlah prasarana pertanian yang digunakan;
- b) Pembangunan Prasarana Pertanian, indikator kegiatan yaitu: Jumlah prasarana pertanian yang dibangun;

F. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan indikator program yaitu: Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).

Definisi operasional: Jumlah Pengendalian PHMS dibagi jumlah kejadian penyakit kasus hewan menular tahun berjalan dikali 100%

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: Pelayanan Kesehatan Hewan;
- b) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: Pelayanan Puskesmas;
- c) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan, indikator kegiatan yaitu: SDM Juru Sembelih Halal (Juleha) yang kompeten;

G. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan indikator program yaitu:

1. Persentase penanggulangan bencana pertanian pada Tanaman Pangan dan Hortikultura

Definisi operasional: $(\text{Jumlah bencana TPH yang di kendalikan} / \text{jumlah bencana TPH tahun berjalan}) \times 100\%$

2. Persentase penanggulangan bencana pertanian pada Tanaman

Perkebunan

Definisi operasional: $(\text{Jumlah bencana tanaman perkebunan yang di kendalikan} / \text{jumlah bencana tanaman perkebunan tahun berjalan}) \times 100\%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: Fasilitasi penanggulangan bencana pertanian;

F. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan indikator program yaitu:

1. Persentase (%) fasilitasi penerbitan legalitas usaha dibidang perkebunan

Definisi operasional: $(\text{Jumlah legalitas usaha perkebunan yang diterbitkan} / \text{jumlah usaha perkebunan yang meminta fasilitasi}) \times 100\%$

2. Persentase (%) fasilitasi penerbitan legalitas usaha dibidang perkebunan

Definisi operasional: $(\text{Jumlah legalitas usaha peternakan yang diterbitkan} / \text{jumlah usaha peternakan yang meminta fasilitasi}) \times 100\%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten, indikator kegiatan yaitu: Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian;

G. Program Penyuluhan Pertanian, dengan indikator program yaitu: Persentase peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani

Definisi operasional: $\text{jumlah kelembagaan petani yang naik kelas} / \text{total jumlah kelompok tani} \times 100\%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, indikator kegiatan yaitu: Penyuluhan pertanian;

Adapun Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</p> <p>Sasaran 1: Menurunnya Prevelansi Stunting</p>	Meningkatnya Ketahanan Pangan				Indeks Ketahanan Pangan		<p>Definisi: Ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan dimensi ketahanan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan</p> <p>Sumber: Hasil rilis perhitungan IKP Kabupaten dari Badan Pangan Nasional (Bapanas)</p>
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan			Ketersediaan Energi per Kapita per Tahun		<p>Definisi: Jumlah energi (kalori) yang tersedia untuk dikonsumsi rata-rata oleh setiap penduduk dalam satu tahun.</p> <p>Rumusan: $\text{total energi tersedia untuk konsumsi (kkal)} = \text{produksi pangan} + \text{Impor} - \text{Ekspor} - \text{Pakan} - \text{Benih} - \text{Industri} - \text{Kehilangan Pascapanen}) \times \text{konversi komposisi zat gizi pangan (kkal)}$ </p>

			Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Definisi: nilai yang menunjukkan tingkat keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan penduduk dibandingkan dengan pola pangan ideal (Pola Pangan Harapan) Sumber: Hasil perhitungan dari aplikasi PPH Bapanas
			Tersedianya Dokumen Ketahanan Pangan		Dokumen Ketahanan Pangan	1.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
						1.1.1. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
						1.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
						1.1.3. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Terkelolanya Cadangan Pangan Daerah		Cadangan Pangan Daerah	1.2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	

						1.2.1. Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	
						1.2.2. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						1.2.3. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Tercapainya tingkat konsumsi pangan perkapita/tahun	Konsumsi pangan perkapita/tahun		1.3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
						1.3.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	
						1.3.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Tersedianya Harga Minimum Daerah Pangan Lokal	Dokumen Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal		1.4. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	
						1.4.1. Penyusunan Kebijakan mengenai Penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota	

			Menurunnya jumlah daerah rentan rawan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	<p>Definisi: Proporsi desa yang dikategorikan memiliki tingkat kerentanan atau kerawanan pangan tertentu dibandingkan dengan jumlah desa seluruhnya</p> <p>Rumusan: $\frac{\text{Jumlah desa rawan pangan}}{\text{Jumlah desa seluruhnya}} \times 100\%$</p>
				Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	2.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
						2.1.1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Adanya Intervensi Desa Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan pangan yang di intervensi	2.2. Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota	
						2.2.1. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
						2.2.2 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
						2.2.3. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Kota	

			Peningkatan persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	<p>Definisi: Ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi pangan segar (hasil pertanian) yang telah diuji atau diawasi, dan dinyatakan sesuai dengan standar mutu, higienitas, serta aman dikonsumsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Rumusan: Jumlah sampel pangan segar yang memenuhi syarat dibagi jumlah total sampel pangan segar yang diuji dikali 100 persen</p>
				Terlaksananya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah pelaksanaan pengawasan pangan segar	3.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
						3.1.1. Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	
						3.1.2. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
						3.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	

<p>NSPK: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</p> <p>Sasaran 2: Meningkatnya pertumbuhan sektor Prima</p>	Meningkatnya Produksi Pertanian				Rata-rata peningkatan produksi pertanian		
		Meningkatnya produktivitas pertanian			Rata-rata produktivitas pertanian(padi, cabai, lada, sawit, sapi dan ayam)		<p>Definisi: Ukuran yang menunjukkan jumlah hasil produksi pertanian per satuan luas lahan pada tahun berjalan</p> <p>Rumusan: total produksi pertanian/total luas lahan</p>
			Meningkatnya produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan		<p>Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Padi)</p> <p>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai)</p> <p>Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Lada dan Sawit)</p> <p>Jumlah Produksi Komoditas Peternakan (Sapi dan Ayam)</p>	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<p>Definisi: total hasil panen yang diperoleh dalam tahun berjalan</p> <p>Sumber Data: Laporan hasil panen dari penyuluh pertanian</p>
				Meningkatnya fasilitas sarana pertanian	Jumlah sarana pertanian yang diberikan	1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
						1.1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	

					1.1.2. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
					1.1.3. Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
			Meningkatnya kontribusi penyediaan benih dan bibit pertanian	Benih dan bibit pertanian	1.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	
					1.2.1. Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	
			Meningkatnya populasi ternak sapi lokal (dalam daerah)	Bibit Sapi	1.3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					1.3.1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
			Penambahan populasi hewan ternak unggas dan sapi dari daerah lain	Bibit ternak (unggas dan sapi)	1.4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					1.4.1. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					1.4.2. Pengadaan BenihTernak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	

			Peningkatan luasan lahan pertanian yang dikelola		Cakupan luas lahan pertanian yang dikelola	2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Definisi: total luas areal pertanian di Kabupaten Belitung yang digunakan, dimanfaatkan, atau diusahakan oleh petani, kelompok tani, badan usaha, maupun pemerintah dalam tahun berjalan. Sumber Data: Laporan Kepala Bidang PSP
				Peningkatan persentase prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	2.1. Pengembangan Prasarana Pertanian	
						2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
						2.1.2. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
						2.1.3. Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	2.2. Pembangunan Prasarana Pertanian	

						2.2.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
						2.2.2. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
						2.2.3. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
						2.2.4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
						2.2.5. Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	
						2.2.6. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
						2.2.7. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
						2.2.8. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	

							<p>Definisi: Tingkat keberhasilan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan penyakit hewan menular yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan/atau kesehatan masyarakat.</p> <p>Rumusan: Jumlah kasus yang berhasil dikendalikan dibagi jumlah total kasus yang ditemukan dikali 100 persen.</p>
		Terkendalnya Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)	3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
			Meningkatnya Persentase (%) fasilitasi penanggulangan penyakit hewan menular	Pelayanan Kesehatan Hewan	3.1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					3.1.1. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Persentase (%) fasilitasi pelayanan jasa medik veteriner	Pelayanan Puskesmas	3.2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					3.2.1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
			Persentase penerapan penyembelihan sesuai syariat	Jumlah SDM Juru Sembelih Halal (Juleha) yang kompeten	3.3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		

					3.3.1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
		Terkendalinya dan tertanggulangnya bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<p>Definisi: ukuran keberhasilan upaya pemerintah atau pihak terkait dalam menangani kejadian bencana yang berdampak pada sektor pertanian</p> <p>Rumusan: Jumlah kejadian bencana pertanian yang ditangani dibagi jumlah total kejadian bencana pertanian dikali 100 persen</p>
			Meningkatnya Persentase penanggulangan bencana pertanian	Jumlah poktan yang mendapat fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					4.1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	
		Terbitnya dokumen legalitas usaha pertanian		Jumlah Dokumen Legalitas Usaha Pertanian yang Diterbitkan	5. Program Perizinan Usaha Pertanian	<p>Definisi: Total dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sebagai bukti pengakuan atau izin legal atas keberadaan dan kegiatan usaha pertanian dalam suatu periode tertentu:</p> <p>Sumber Data: Laporan Bidang Perkebunan dan Bidang Peternakan</p>

			Persentase (%) usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	5.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					5.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	
		Persentase peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani		Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kelembagaannya	6. Program Penyuluhan Pertanian	Definisi: Jumlah kelompok tani yang berhasil naik peringkat kelas berdasarkan hasil penilaian tingkat perkembangan kelembagaan kelompok tani dalam suatu periode tertentu. Sumberdata: Laporan Bidang PSP
			Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani	Jumlah kelembagaan kelompok tani yang dibina	6.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					6.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					6.1.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	

						6.1.3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
						6.1.4. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana *strategic* yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta dan misi dan visi pemerintah daerah

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pada awalnya mengalami penyesuaian yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan sebagai pedoman operasional kegiatan selanjutnya. Program dan kegiatan prioritas yang telah dievaluasi tersebut terdapat dalam Tabel 4.2 berikut:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					390.865.000,00		468.637.000,00		445.814.000,00		475.307.000,00		489.951.000,00		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					282.619.000,00		280.162.000,00		247.915.000,00		267.511.000,00		271.768.000,00		
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor)	86,50	-	87,40	282.619.000,00	87,90	280.162.000,00	88,40	247.915.000,00	88,90	267.511.000,00	89,40	271.768.000,00		
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi) (Skor)	81,9	-	87,2		87,70		88,2		88,7		89,2			
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					10.004.000,00		64.575.000,00		67.329.000,00		70.196.000,00		64.207.000,00		
Tersedianya dokumen ketahanan pangan	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	0	0	10.004.000,00	1	64.575.000,00	1	67.329.000,00	1	70.196.000,00	1	64.207.000,00		
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	1	0	1		1		1		1		1			
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota					0,00		42.000.000,00		44.100.000,00		46.305.000,00		48.621.000,00	tanjung Pandan , KAB. BELITUNG , Lesung Batang	
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	0	0	0,00	1	42.000.000,00	1	44.100.000,00	1	46.305.000,00	1	48.621.000,00		
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					3.889.000,00		9.975.000,00		9.999.000,00		9.999.000,00		1.000.000,00	KAB. BELITUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	1	0	1	3.889.000,00	1	9.975.000,00	1	9.999.000,00	1	9.999.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					6.115.000,00		12.600.000,00		13.230.000,00		13.892.000,00		14.586.000,00	KAB. BELITUNG , Tanjung Pandan , Lesung Batang	
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	1	6.115.000,00	1	12.600.000,00	1	13.230.000,00	1	13.892.000,00	1	14.586.000,00		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					243.692.000,00		192.812.000,00		163.496.000,00		171.872.000,00		180.722.000,00		
Terkelolanya cadangan pangan daerah	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	7,974	12	7	243.692.000,00	6	192.812.000,00	5	163.496.000,00	4	171.872.000,00	4	180.722.000,00		
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	0	0	5		6		5		5		5			
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	24,67	30,69	22,69		20,69		20,69		20,69		21,69			
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					196.902.000,00		94.320.000,00		75.754.000,00		75.910.000,00		80.910.000,00	KAB. BELITUNG , Tanjung Pandan	
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	0	0	5	196.902.000,00	6	94.320.000,00	5	75.754.000,00	5	75.910.000,00	5	80.910.000,00		
2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota					19.310.000,00		21.062.000,00		19.312.000,00		19.312.000,00		19.312.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	7,974	12	7	19.310.000,00	6	21.062.000,00	5	19.312.000,00	4	19.312.000,00	4	19.312.000,00		
2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota					27.480.000,00		77.430.000,00		68.430.000,00		76.650.000,00		80.500.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	24,67	30,69	22,69	27.480.000,00	20,69	77.430.000,00	20,69	68.430.000,00	20,69	76.650.000,00	21,69	80.500.000,00		
2.09.03.2.03 - Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi					14.600.000,00		6.500.000,00		2.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya dokumen penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	0	0	1	14.600.000,00	1	6.500.000,00	1	2.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
2.09.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal					14.600.000,00		6.500.000,00		2.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	0	0	1	14.600.000,00	1	6.500.000,00	1	2.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					14.323.000,00		16.275.000,00		15.090.000,00		17.943.000,00		18.839.000,00		
Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	-	-	1	14.323.000,00	1	16.275.000,00	1	15.090.000,00	1	17.943.000,00	1	18.839.000,00		
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					615.000,00		1.050.000,00		1.103.000,00		1.158.000,00		1.216.000,00	KAB. BELITUNG , Tanjung Pandan , Lesung Batang	
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	1	615.000,00	1	1.050.000,00	1	1.103.000,00	1	1.158.000,00	1	1.216.000,00		
2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					13.708.000,00		15.225.000,00		13.987.000,00		16.785.000,00		17.623.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	-	-	1	13.708.000,00	1	15.225.000,00	1	13.987.000,00	1	16.785.000,00	1	17.623.000,00		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					23.549.000,00		72.975.000,00		76.624.000,00		80.456.000,00		84.478.000,00		
Berkurangnya daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12,24	-	2,2	23.549.000,00	1,9	72.975.000,00	1,7	76.624.000,00	1,5	80.456.000,00	1,31	84.478.000,00		
	Persentase Daerah Rawan Pangan yang diintervensi (%)	100	-	100		100		100		100		100			
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					7.535.000,00		23.100.000,00		24.255.000,00		25.468.000,00		26.741.000,00		
Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2	2	2	7.535.000,00	1	23.100.000,00	1	24.255.000,00	1	25.468.000,00	1	26.741.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					7.535.000,00		23.100.000,00		24.255.000,00		25.468.000,00		26.741.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2	2	2	7.535.000,00	1	23.100.000,00	1	24.255.000,00	1	25.468.000,00	1	26.741.000,00		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					16.014.000,00		49.875.000,00		52.369.000,00		54.988.000,00		57.737.000,00		
Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1	16.014.000,00	1	49.875.000,00	1	52.369.000,00	1	54.988.000,00	1	57.737.000,00		
	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	0	0	1		1		1		1					
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	0		1		1		1					
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					0,00		29.400.000,00		30.870.000,00		32.414.000,00		34.034.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	0	0,00	1	29.400.000,00	1	30.870.000,00	1	32.414.000,00	1	34.034.000,00		
2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi					11.220.000,00		12.600.000,00		13.230.000,00		13.892.000,00		14.586.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	0	0	1	11.220.000,00	1	12.600.000,00	1	13.230.000,00	1	13.892.000,00	1	14.586.000,00		
2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					4.794.000,00		7.875.000,00		8.269.000,00		8.682.000,00		9.117.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1	4.794.000,00	1	7.875.000,00	1	8.269.000,00	1	8.682.000,00	1	9.117.000,00		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					84.697.000,00		115.500.000,00		121.275.000,00		127.340.000,00		133.705.000,00		
Meningkatnya kualitas mutu dan keamanan pangan segar	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	-	100	84.697.000,00	100	115.500.000,00	100	121.275.000,00	100	127.340.000,00	100	133.705.000,00		
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					84.697.000,00		115.500.000,00		121.275.000,00		127.340.000,00		133.705.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	
Terlaksananya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	1	84.697.000,00	1	115.500.000,00	1	121.275.000,00	1	127.340.000,00	1	133.705.000,00			
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	-	-	-		1				1				1		
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan					0,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.577.000,00		12.155.000,00	KAB. BELITUNG		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	-	-	-	0,00	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.577.000,00	1	12.155.000,00			
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					84.697.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.763.000,00		121.550.000,00	KAB. BELITUNG		
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	1	84.697.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.763.000,00	1	121.550.000,00			
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					21.008.888.000,00		31.272.865.000,00		33.742.566.000,00		36.427.168.000,00		39.346.683.000,00			
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.365.682.000,00		20.984.030.000,00		22.948.322.000,00		25.102.337.000,00		27.464.733.000,00			
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	-	-	73	15.365.682.000,00	74	20.984.030.000,00	75	22.948.322.000,00	76	25.102.337.000,00	77	27.464.733.000,00			
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	100				100				100			100	
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100	100				100				100			100	
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	90	90	90				90				90			90	
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	-	0	75				75,50				76			76,50	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.482.000,00		1.520.000,00		1.520.000,00		1.520.000,00		1.520.000,00		
Tersusunnya dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	3	1.482.000,00	3	1.520.000,00	3	1.520.000,00	3	1.520.000,00	3	1.520.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	3	3	3	3		3		3					
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					741.000,00		760.000,00		760.000,00		760.000,00		760.000,00	KAB. BELITUNG , Tanjung Pandan , Lesung Bataang	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	3	741.000,00	3	760.000,00	3	760.000,00	3	760.000,00	3	760.000,00		
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					741.000,00		760.000,00		760.000,00		760.000,00		760.000,00	KAB. BELITUNG , Tanjung Pandan	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	3	3	741.000,00	3	760.000,00	3	760.000,00	3	760.000,00	3	760.000,00		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.475.113.000,00		18.304.800.000,00		20.135.200.000,00		22.148.640.000,00		24.363.424.000,00		
Tersusunnya dokumen keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	14.475.113.000,00	1	18.304.800.000,00	1	20.135.200.000,00	1	22.148.640.000,00	1	24.363.424.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	97	97	97		97		97		97		97			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	-	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.474.363.000,00		18.304.000.000,00		20.134.400.000,00		22.147.840.000,00		24.362.624.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	97	97	97	14.474.363.000,00	97	18.304.000.000,00	97	20.134.400.000,00	97	22.147.840.000,00	97	24.362.624.000,00		
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					250.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	KAB. BELITUNG , Tanjung Pandan	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	250.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	KAB. BELITUNG , Tanjung Pandan	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					52.500.000,00		186.900.000,00		196.246.000,00		206.057.000,00		216.361.000,00		
Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	5	52.500.000,00	5	186.900.000,00	5	196.246.000,00	5	206.057.000,00	5	216.361.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	-	-		1		1		1		1			
3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		76.650.000,00		80.483.000,00		84.507.000,00		88.733.000,00	KAB. BELITUNG , Tanjung Pandan , Lesung Batang	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	-	-	0,00	1	76.650.000,00	1	80.483.000,00	1	84.507.000,00	1	88.733.000,00		
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					52.500.000,00		110.250.000,00		115.763.000,00		121.550.000,00		127.628.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	5	52.500.000,00	5	110.250.000,00	5	115.763.000,00	5	121.550.000,00	5	127.628.000,00		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					246.461.000,00		520.065.000,00		546.070.000,00		573.373.000,00		602.042.000,00		
Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	246.461.000,00	2	520.065.000,00	2	546.070.000,00	2	573.373.000,00	2	602.042.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2		2		2		2					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1					
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.603.000,00		12.600.000,00		13.230.000,00		13.892.000,00		14.586.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	9.603.000,00	1	12.600.000,00	1	13.230.000,00	1	13.892.000,00	1	14.586.000,00		
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					65.983.000,00		59.325.000,00		62.292.000,00		65.405.000,00		68.676.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	65.983.000,00	2	59.325.000,00	2	62.292.000,00	2	65.405.000,00	2	68.676.000,00		
3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					9.822.000,00		24.675.000,00		25.909.000,00		27.204.000,00		28.565.000,00	KAB. BELITUNG , Tanjung Pandan	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	9.822.000,00	1	24.675.000,00	1	25.909.000,00	1	27.204.000,00	1	28.565.000,00		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					70.200.000,00		161.700.000,00		169.785.000,00		178.275.000,00		187.189.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	70.200.000,00	2	161.700.000,00	2	169.785.000,00	2	178.275.000,00	2	187.189.000,00		
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.853.000,00		29.400.000,00		30.870.000,00		32.414.000,00		34.034.000,00	KAB. BELITUNG , Tanjung Pandan , Lesung Batang	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	15.853.000,00	1	29.400.000,00	1	30.870.000,00	1	32.414.000,00	1	34.034.000,00		
3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0,00		1.365.000,00		1.434.000,00		1.505.000,00		1.581.000,00	Tanjung Pandan , KAB. BELITUNG , Lesung Batang	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	1.365.000,00	1	1.434.000,00	1	1.505.000,00	1	1.581.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					75.000.000,00		231.000.000,00		242.550.000,00		254.678.000,00		267.411.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	75.000.000,00	12	231.000.000,00	12	242.550.000,00	12	254.678.000,00	12	267.411.000,00		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00		836.850.000,00		878.693.000,00		922.627.000,00		968.759.000,00		
Tersedianya barang milik daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	-	-	0,00	1	836.850.000,00	1	878.693.000,00	1	922.627.000,00	1	968.759.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	-		11		11		11		11			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27	2	-		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	18	-	-		10		10		10		10			
3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		525.000.000,00		551.250.000,00		578.813.000,00		607.753.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	-	0,00	11	525.000.000,00	11	551.250.000,00	11	578.813.000,00	11	607.753.000,00		
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0,00		18.375.000,00		19.294.000,00		20.258.000,00		21.271.000,00	Tanjung Pandan	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	18	-	-	0,00	10	18.375.000,00	10	19.294.000,00	10	20.258.000,00	10	21.271.000,00		
3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00		83.475.000,00		87.649.000,00		92.031.000,00		96.633.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27	2	-	0,00	3	83.475.000,00	3	87.649.000,00	3	92.031.000,00	3	96.633.000,00		
3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		243.102.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	-	-	0,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.102.000,00		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					366.290.000,00		508.620.000,00		534.052.000,00		560.753.000,00		588.792.000,00		
Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	366.290.000,00	12	508.620.000,00	12	534.052.000,00	12	560.753.000,00	12	588.792.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12			
3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.620.000,00		2.520.000,00		2.646.000,00		2.779.000,00		2.918.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	1.620.000,00	12	2.520.000,00	12	2.646.000,00	12	2.779.000,00	12	2.918.000,00		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					165.600.000,00		200.550.000,00		210.578.000,00		221.106.000,00		232.162.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	165.600.000,00	12	200.550.000,00	12	210.578.000,00	12	221.106.000,00	12	232.162.000,00		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					199.070.000,00		305.550.000,00		320.828.000,00		336.868.000,00		353.712.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	199.070.000,00	12	305.550.000,00	12	320.828.000,00	12	336.868.000,00	12	353.712.000,00		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					223.836.000,00		625.275.000,00		656.541.000,00		689.367.000,00		723.835.000,00		
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	43	36	70	223.836.000,00	70	625.275.000,00	70	656.541.000,00	70	689.367.000,00	70	723.835.000,00		
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	3	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	24	40		40		40		40		40			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	3	6		6		6		6		6		6	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					33.813.000,00		98.175.000,00		103.084.000,00		108.238.000,00		113.650.000,00	Tanjung Pandan , KAB. BELITUNG	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	21	21	33.813.000,00	21	98.175.000,00	21	103.084.000,00	21	108.238.000,00	21	113.650.000,00		
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					41.738.000,00		107.625.000,00		113.007.000,00		118.657.000,00		124.590.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	24	40	41.738.000,00	40	107.625.000,00	40	113.007.000,00	40	118.657.000,00	40	124.590.000,00		
3.27.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					86.140.000,00		160.125.000,00		168.132.000,00		176.538.000,00		185.365.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	3	3	3	86.140.000,00	3	160.125.000,00	3	168.132.000,00	3	176.538.000,00	3	185.365.000,00		
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24.360.000,00		44.100.000,00		46.305.000,00		48.621.000,00		51.051.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	43	36	70	24.360.000,00	70	44.100.000,00	70	46.305.000,00	70	48.621.000,00	70	51.051.000,00		
3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					37.785.000,00		215.250.000,00		226.013.000,00		237.313.000,00		249.179.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	3	6	37.785.000,00	6	215.250.000,00	6	226.013.000,00	6	237.313.000,00	6	249.179.000,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					869.001.000,00		2.818.700.000,00		2.959.636.000,00		3.107.618.000,00		3.262.997.000,00		
Meningkatnya produksi perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Lada) (Kg)	4.321.862	-	4.764.852,86	18.048.600,00	5.003.095	350.700.000,00	5.253.250	368.235.600,00	5.515.913	386.646.800,00	5.791.708	405.979.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Sawit (TBS)) (Kg)	59.969.391	-	66.116.253,58		69.422.066		72.893.170		76.537.828		80.364.719			
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					90.243.000,00		1.111.400.000,00		1.166.971.000,00		1.225.319.000,00		1.286.584.000,00		
Fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	0	0	-	18.048.600,00	1	350.700.000,00	1	368.235.600,00	1	386.646.800,00	1	405.979.200,00		
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	4				4				4			
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					18.048.600,00		137.550.000,00		144.427.600,00		151.648.800,00		159.231.200,00	KAB. BELITUNG	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	4	18.048.600,00	4	137.550.000,00	4	144.427.600,00	4	151.648.800,00		159.231.200,00		
3.27.02.2.01.0008 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang					0,00		213.150.000,00		223.808.000,00		234.998.000,00		246.748.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	0	0	-	0,00	1	213.150.000,00	1	223.808.000,00	1	234.998.000,00	1	246.748.000,00		
Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan Sapi (Kg)	70.686	-	75.174	778.758.000,00	79.662	1.707.300.000,00	84.150	1.792.665.000,00	88.638	1.882.299.000,00	93.126	1.976.413.000,00		
	Jumlah Produksi Komoditas Peternakan Ayam (Kg)	4.917.860	-	5.421.941		5.693.038		5.977.690		6.276.574		6.590.403			
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					490.438.000,00		613.200.000,00		643.860.000,00		676.053.000,00		709.856.000,00		
Penyediaan benih dan bibit pertanian	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	1	490.438.000,00	1	613.200.000,00	1	643.860.000,00	1	676.053.000,00	1	709.856.000,00		
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					490.438.000,00		613.200.000,00		643.860.000,00		676.053.000,00		709.856.000,00	KAB. BELITUNG	
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	1	490.438.000,00	1	613.200.000,00	1	643.860.000,00	1	676.053.000,00	1	709.856.000,00		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					159.364.000,00		168.000.000,00		176.400.000,00		185.220.000,00		194.481.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
Bertambahnya populasi ternak sapi yang berkualitas	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	1	1	159.364.000,00	1	168.000.000,00	1	176.400.000,00	1	185.220.000,00	1	194.481.000,00		
3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil					159.364.000,00		168.000.000,00		176.400.000,00		185.220.000,00		194.481.000,00	KAB. BELITUNG	
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	1	1	159.364.000,00	1	168.000.000,00	1	176.400.000,00	1	185.220.000,00	1	194.481.000,00		
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					128.956.000,00		926.100.000,00		972.405.000,00		1.021.026.000,00		1.072.076.000,00		
Penambahan populasi hewan ternak (unggas dan sapi)	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	1.500	9.500	1.500	128.956.000,00	1.500	926.100.000,00	1.500	972.405.000,00	1.500	1.021.026.000,00	1.500	1.072.076.000,00		
	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	0	60	100		100		100		100		100			
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					106.106.000,00		863.100.000,00		906.255.000,00		951.568.000,00		999.146.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	1.500	9.500	1.500	106.106.000,00	1.500	863.100.000,00	1.500	906.255.000,00	1.500	951.568.000,00	1.500	999.146.000,00		
3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					22.850.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.458.000,00		72.930.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	0	60	100	22.850.000,00	100	63.000.000,00	100	66.150.000,00	100	69.458.000,00	100	72.930.000,00		
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Cabai (Kg)	1.183.000	-	1.290.000	72.194.400,00	1.345.000	750.200.000,00	1.401.000	787.710.400,00	1.458.000	827.095.200,00	1.516.000	868.449.800,00		
	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Padi (Kg)	870.200	-	1.691.120		2.358.050		3.039.830		3.736.720		4.448.970			
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					90.243.000,00		1.111.400.000,00		1.166.971.000,00		1.225.319.000,00		1.286.584.000,00		
Fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	4	72.194.400,00	4	750.200.000,00	4	787.710.400,00	4	827.095.200,00	4	868.449.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	0	-		1		1		1		1			
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					72.194.400,00		550.200.000,00		577.710.400,00		606.595.200,00		636.924.800,00	KAB. BELITUNG	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	4	72.194.400,00	4	550.200.000,00	4	577.710.400,00	4	606.595.200,00	4	636.924.800,00		
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih					0,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	0	-	0,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pendampingan kelompok tani yang menerima sarana pertanian (%)	100	-	100	0,00	100	10.500.000,00	100	11.025.000,00	100	11.577.000,00	100	12.155.000,00		
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					90.243.000,00		1.111.400.000,00		1.166.971.000,00		1.225.319.000,00		1.286.584.000,00		
Fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	0	0	-	0,00	4	10.500.000,00	4	11.025.000,00	4	11.577.000,00	4	12.155.000,00		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					0,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.577.000,00		12.155.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	0	0	-	0,00	4	10.500.000,00	4	11.025.000,00	4	11.577.000,00	4	12.155.000,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					4.287.983.000,00		6.147.750.000,00		6.455.138.000,00		6.777.894.000,00		7.116.784.000,00		
Tersedianya prasarana pertanian yang memadai	Persentase Luas Lahan Pertanian yang dikelola (%)	18,91	-	20,88	4.287.983.000,00	21,86	6.147.750.000,00	22,85	6.455.138.000,00	23,83	6.777.894.000,00	24,82	7.116.784.000,00		
	Luas Areal Perkebunan yang mendapatkan Pendampingan (Ha)	743	-	850		950		1.050		1.150		1.250			
	Persentase Prasarana Peternakan yang Terkelola (%)	100	-	100		100		100		100		100			
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian					393.154.000,00		619.500.000,00		650.475.000,00		683.000.000,00		717.148.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
Termanfaatkannya prasarana pertanian dengan baik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	1	1	393.154.000,00	1	619.500.000,00	1	650.475.000,00	1	683.000.000,00	1	717.148.000,00		
	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1	1	-		1		1		1					
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					350.000.000,00		367.500.000,00		385.875.000,00		405.169.000,00		425.427.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	1	1	350.000.000,00	1	367.500.000,00	1	385.875.000,00	1	405.169.000,00	1	425.427.000,00		
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota					43.154.000,00		144.900.000,00		152.145.000,00		159.753.000,00		167.740.000,00	KAB. BELITUNG	
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1	1	43.154.000,00	1	144.900.000,00	1	152.145.000,00	1	159.753.000,00	1	167.740.000,00		
3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota					0,00		107.100.000,00		112.455.000,00		118.078.000,00		123.981.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1	1	-	0,00	1	107.100.000,00	1	112.455.000,00	1	118.078.000,00	1	123.981.000,00		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian					3.894.829.000,00		5.528.250.000,00		5.804.663.000,00		6.094.894.000,00		6.399.636.000,00		
Bertambahnya dan terpeliharanya prasarana pertanian	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	2	3.894.829.000,00	2	5.528.250.000,00	2	5.804.663.000,00	3	6.094.894.000,00	3	6.399.636.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	4		4		3		3		3			
	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2	2	3		3		3		3		3			
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	4		5		6		6		6			
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian					100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.763.000,00		121.550.000,00	KAB. BELITUNG	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	2	110.250.000,00	2	115.763.000,00	2	121.550.000,00		
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					500.000.000,00		525.000.000,00		551.250.000,00		578.813.000,00		607.753.000,00	KAB. BELITUNG	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	4	500.000.000,00	5	525.000.000,00	6	551.250.000,00	6	578.813.000,00	6	607.753.000,00		
3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit					720.000.000,00		756.000.000,00		793.800.000,00		833.490.000,00		875.165.000,00	KAB. BELITUNG	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	3	720.000.000,00	3	756.000.000,00	3	793.800.000,00	3	833.490.000,00	3	875.165.000,00		
3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air					90.000.000,00		94.500.000,00		99.225.000,00		104.187.000,00		109.395.000,00	KAB. BELITUNG	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	3	90.000.000,00	3	94.500.000,00	3	99.225.000,00	3	104.187.000,00	3	109.395.000,00		
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya					1.000.000.000,00		1.050.000.000,00		1.102.500.000,00		1.157.625.000,00		1.215.507.000,00	KAB. BELITUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	2	1.000.000.000,00	2	1.050.000.000,00	2	1.102.500.000,00	3	1.157.625.000,00	3	1.215.507.000,00		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					1.200.000.000,00		1.575.000.000,00		1.653.750.000,00		1.736.438.000,00		1.823.260.000,00	KAB. BELITUNG	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	4	1.200.000.000,00	4	1.575.000.000,00	3	1.653.750.000,00	3	1.736.438.000,00	3	1.823.260.000,00		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					220.000.000,00		231.000.000,00		242.550.000,00		254.678.000,00		267.411.000,00	KAB. BELITUNG	
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0	0	2	220.000.000,00	2	231.000.000,00	2	242.550.000,00	2	254.678.000,00	2	267.411.000,00		
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan					64.829.000,00		1.191.750.000,00		1.251.338.000,00		1.313.900.000,00		1.379.595.000,00	KAB. BELITUNG	
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2	2	3	64.829.000,00	3	1.191.750.000,00	3	1.251.338.000,00	3	1.313.900.000,00	3	1.379.595.000,00		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					206.069.000,00		362.880.000,00		381.025.000,00		400.075.000,00		420.079.000,00		
Terkendalnya Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	100	100	206.069.000,00	100	362.880.000,00	100	381.025.000,00	100	400.075.000,00	100	420.079.000,00		
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					49.053.000,00		155.925.000,00		163.722.000,00		171.907.000,00		180.503.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	4	4	4	49.053.000,00	4	155.925.000,00	4	163.722.000,00	4	171.907.000,00	4	180.503.000,00		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					49.053.000,00		155.925.000,00		163.722.000,00		171.907.000,00		180.503.000,00	KAB. BELITUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	4	4	4	49.053.000,00	4	155.925.000,00	4	163.722.000,00	4	171.907.000,00	4	180.503.000,00		
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					157.016.000,00		182.280.000,00		191.394.000,00		200.964.000,00		211.011.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	4	12	4	157.016.000,00	4	182.280.000,00	4	191.394.000,00	4	200.964.000,00	4	211.011.000,00		
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					157.016.000,00		182.280.000,00		191.394.000,00		200.964.000,00		211.011.000,00	KAB. BELITUNG	
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	4	12	4	157.016.000,00	4	182.280.000,00	4	191.394.000,00	4	200.964.000,00	4	211.011.000,00		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					0,00		24.675.000,00		25.909.000,00		27.204.000,00		28.565.000,00		
Tersedianya SDM Juru Sembelih Halal (Juleha) yang kompeten	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	30	30	-	0,00	30	24.675.000,00	30	25.909.000,00	30	27.204.000,00	30	28.565.000,00		
3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan					0,00		24.675.000,00		25.909.000,00		27.204.000,00		28.565.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	30	30	-	0,00	30	24.675.000,00	30	25.909.000,00	30	27.204.000,00	30	28.565.000,00		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					33.750.000,00		81.900.000,00		85.995.000,00		90.295.000,00		94.809.000,00		
Terkendalnya hama penyakit tanaman	Persentase Penanganan Bencana Pertanian pada Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	100	-	100	33.750.000,00	100	81.900.000,00	100	85.995.000,00	100	90.295.000,00	100	94.809.000,00		
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian pada Tanaman Perkebunan (%)	100	-	100		100		100		100					
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					33.750.000,00		81.900.000,00		85.995.000,00		90.295.000,00		94.809.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
Tertanggulangnya bencana pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	370	370	370	33.750.000,00	370	81.900.000,00	370	85.995.000,00	370	90.295.000,00	370	94.809.000,00		
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					33.750.000,00		81.900.000,00		85.995.000,00		90.295.000,00		94.809.000,00	KAB. BELITUNG	
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	370	370	370	33.750.000,00	370	81.900.000,00	370	85.995.000,00	370	90.295.000,00	370	94.809.000,00		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					9.840.000,00		119.280.000,00		125.245.000,00		131.506.000,00		138.084.000,00		
Meningkatnya kepemilikan legalitas usaha di bidang perkebunan	Persentase fasilitasi penerbitan legalitas usaha di bidang peternakan (%)	100	-	100	9.840.000,00	100	119.280.000,00	100	125.245.000,00	100	131.506.000,00	100	138.084.000,00		
	Persentase fasilitasi penerbitan legalitas usaha di bidang perkebunan (%)	81,67	-	84		85		86		87		88			
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					9.840.000,00		119.280.000,00		125.245.000,00		131.506.000,00		138.084.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	0	1	1	9.840.000,00	1	119.280.000,00	1	125.245.000,00	1	131.506.000,00	1	138.084.000,00		
	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	-	-	-		1		1		1		1			
3.27.06.2.01.0004 - Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak					0,00		23.856.000,00		25.049.000,00		26.301.000,00		27.618.000,00	KAB. BELITUNG	
terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik (Unit)	-	-	-	0,00	1	23.856.000,00	1	25.049.000,00	1	26.301.000,00	1	27.618.000,00		
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian					9.840.000,00		95.424.000,00		100.196.000,00		105.205.000,00		110.466.000,00	KAB. BELITUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	0	1	1	9.840.000,00	1	95.424.000,00	1	100.196.000,00	1	105.205.000,00	1	110.466.000,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					236.563.000,00		758.325.000,00		787.205.000,00		817.443.000,00		849.197.000,00		
Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani	Persentase peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani (%)	4,21	-	4,47	236.563.000,00	4,74	758.325.000,00	5	787.205.000,00	5,26	817.443.000,00	5,53	849.197.000,00		
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					236.563.000,00		758.325.000,00		787.205.000,00		817.443.000,00		849.197.000,00		
Terbinanya kelembagaan kelompok tani	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	30	40	35	236.563.000,00	40	758.325.000,00	40	787.205.000,00	40	817.443.000,00	40	849.197.000,00		
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	4	4	-		4		4		4		4			
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	380	380	380		380		380		380		380			
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					0,00		343.350.000,00		360.600.000,00		378.630.000,00		397.562.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	4	4	-	0,00	4	343.350.000,00	4	360.600.000,00	4	378.630.000,00	4	397.562.000,00		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					16.575.000,00		156.450.000,00		164.273.000,00		172.486.000,00		181.111.000,00	KAB. BELITUNG	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	380	380	380	16.575.000,00	380	156.450.000,00	380	164.273.000,00	380	172.486.000,00	380	181.111.000,00		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					37.588.000,00		76.125.000,00		79.932.000,00		83.927.000,00		88.124.000,00	KAB. BELITUNG	
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	0	0	1	37.588.000,00	1	76.125.000,00	1	79.932.000,00	1	83.927.000,00	1	88.124.000,00		
3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian					182.400.000,00		182.400.000,00		182.400.000,00		182.400.000,00		182.400.000,00	KAB. BELITUNG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	30	40	35	182.400.000,00	40	182.400.000,00	40	182.400.000,00	40	182.400.000,00	40	182.400.000,00		

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana *strategic* yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta misi dan visi pemerintah daerah

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pada awalnya mengalami penyesuaian yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan sebagai pedoman operasional kegiatan selanjutnya. Program dan kegiatan prioritas yang telah dievaluasi tersebut terdapat dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	1.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan harga pangan	Menunjang sasaran RPJMD "Menurunnya prevalensi stunting" dan mendukung program prioritas bupati "Siaga Stunting" proyek strategis penurunan prevalansi stunting
			1.1.1. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			1.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
			1.1.3. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			1.2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			1.2.1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	
			1.2.2. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			1.2.3. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			1.3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			1.3.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	

			1.3.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			1.4. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	
			1.4.1. Penyusunan Kebijakan mengenai Penentuan Harga Pangan Lokal Minimum Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota	
2	Penanganan Kerawanan Pangan	Menurunnya jumlah daerah rentan rawan pangan	2.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Menunjang sasaran RPJMD "Menurunnya prevalensi stunting" dan mendukung program prioritas bupati "Siaga Stunting" proyek strategis penurunan prevalansi stunting
			2.1.1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			2.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.2.1. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			2.2.2. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
			2.2.3. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Kota	
3	Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan	3.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Menunjang sasaran RPJMD "Meningkatnya pertumbuhan sektor Prima" dan Program Prioritas Bupati "Prima Unggul untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Prima Proyek Strategis Swasembada Pangan"

			3.1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.1.2. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			3.1.3. Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
			3.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.2.1. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			3.3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.3.1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
			3.4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.4.1. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.4.1. Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
4	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	4.1. Pengembangan Prasarana Pertanian	Menunjang sasaran RPJMD "Meningkatnya pertumbuhan sektor Prima" dan Program Prioritas Bupati "Prima Unggul untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Prima Proyek Strategis Swasembada Pangan"
			4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	

			4.1.2. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
			4.1.3. Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	DATA AWAL (2024)	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
	Tujuan									
1	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	62,34	62,64	62,94	63,23	63,53	63,83	64,13	Sumber: Hasil rilis perhitungan IKP Kabupaten dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kertas kerja perhitungan target ada di Lampiran 2
2	Rata-rata peningkatan produksi pertanian tahunan	%	2,22	10,05	10,61	10,78	8,95	7,89	7,19	Rumusan: rata-rata produksi padi, cabai, sawit, lada, sapi dan ayam tahun berjalan dikurang produksi tahun sebelumnya dibagi produksi tahun sebelumnya dikali 100%. Perhitungan target pada Lampiran 3
	Sasaran									
3	Ketersediaan Energi per Kapita per Tahun	kkal/kap/tahun	948.080	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000	Standar Nasional
4	Rata-rata peningkatan produktivitas pertanian	%	-9,12	13,22	2,88	2,86	2,83	2,80	2,78	Rumusan: rata-rata produktivitas padi, cabai, sawit, lada, sapi dan ayam tahun berjalan dikurang produktivitas tahun sebelumnya dibagi produktivitas tahun sebelumnya dikali 100%. Perhitungan target pada Lampiran 3

Dari Tabel 4.4. dapat kita lihat bahwa untuk mengukur pencapaian tujuan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Belitung digunakan indikator Indeks Ketahanan Pangan untuk Urusan Pangan dan Rata-rata Peningkatan Produksi Pertanian untuk Urusan Pertanian. Untuk Pengukuran sasaran digunakan indikator Ketersediaan Energi per Kapita per Tahun untuk Urusan Pangan dan Rata-rata Peningkatan Produktivitas Pertanian untuk urusan Pertanian. Perhitungan target disajikan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

Selain Indikator Kinerja Utama, ada juga Indikator Kinerja Kunci yang bersarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disajikan pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

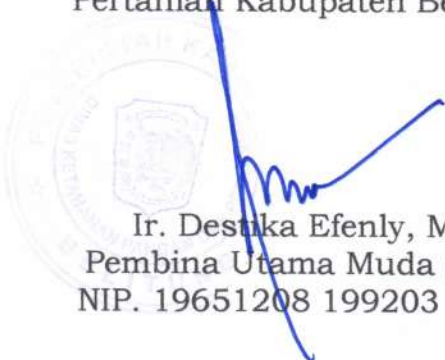
NO	INDIKATOR	SATUAN	DATA AWAL 2024	TARGET TAHUNAN						KET (Definisi Operasional)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase cadangan pangan	persen	91,01	141,91	129,41	129,41	129,41	135,66	141,91	Perhitungan sesuai dengan Permendagri no 19 Tahun 2024 Rumusan: Jumlah cadangan pangan pemerintah kab dibagi jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten yang ditetapkan dikali 100%
2	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun									
	Padi	ton/ha	2,612	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	Rumusan: Jumlah produksi padi dibagi luas tambah tanam tahun berjalan
	Cabai	ton/ha	3,56	5,00	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	Rumusan: Jumlah produksi cabai dibagi luas tambah tanam tahun berjalan
	Lada (lada kering)	ton/ha	0,97	1,13	1,19	1,25	1,31	1,38	1,49	Rumusan: Jumlah produksi lada dibagi luas tambah tanam tahun berjalan
	Sawit (TBS)	ton/ha	12,61	13,24	13,90	14,60	15,33	16,10	16,90	Rumusan: Jumlah produksi sawit dibagi luas tambah tanam tahun berjalan
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	-37,9	2	2	2	2	2	2	Rumusan: Jumlah kasus penyakit hewan menular tahun berjalan dikurang jumlah kasus penyakit hewan tahun sebelumnya dibagi jumlah kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dibuat untuk dapat digunakan sebagai Kerangka Acuan Pembangunan di Kabupaten Belitung tahun 2025-2029, yang mendefinisikan arah, tujuan, sasaran serta strategi dalam mencapai keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Belitung. Diharapkan dengan adanya dokumen Rencana Strategis ini, pembangunan pertanian di Kabupaten Belitung dapat berjalan dengan baik dan terencana sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.

Tanjungpandan, September 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Belitung



Ir. Destika Efenly, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651208 199203 1 005

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil FGD Penentuan Program Prioritas

RPJMD					Renstra						
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator Program
Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat	1.1 Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	1.1.a Indeks Modal Manusia	1.1.3 Menurunnya prevalensi stunting	1.1.3.a Prevalensi Stunting	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan	Ketersediaan Energi Perkapita per tahun	Terjaganya pasokan bahan pangan daerah	1. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi)
									Berkurangnya desa rawan pangan	2. Penanganan Kerawanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
2. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial	2.1 Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	2.1.a Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.1.2 Meningkatnya pertumbuhan sektor Prima	2.1.2.a Pertumbuhan Sektor Prima (pertanian, perikanan dan		Rata-rata peningkatan produksi pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian	Rata-rata peningkatan produktivitas pertanian(padi, cabai, lada, sawit,	Terpenuhinya kebutuhan sarana pertanian	3. Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Padi dan Cabai)
									Tersedianya prasarana pertanian	4. Penyediaan dan Pengembangan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jumlah Produksi Komoditas Peternakan (Sapi dan Ayam) Persentase pendampingan kelompok tani yang menerima sarana pertanian Persentase Luas Lahan Pertanian yang dikelola Persentase Prasarana Peternakan yang Luas Areal Perkebunan yang mendapatkan Pendampingan

Lampiran 2. Penentuan Target IKP Kabupaten Belitung

Realisasi

Tahun	IKP	Peningkatan
2020	61.15	
2021	60.93	-0.22
2022	61.55	0.62
2023	61.83	0.28
2024	62.34	0.51
Rata-rata peningkatan		0.2975

Target

Tahun	
2025	62.64
2026	62.94
2027	63.23
2028	63.53
2029	63.83
2030	64.13

Lampiran 3. Tabel Perhitungan Baseline dan Target Peningkatan Produksi (dalam kg)

Komoditas	Realisasi		Target						Peningkatan Produksi Tahunan						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Padi (GKG)	679,700	870,200	1,197,160	1,691,120	2,358,050	3,039,830	3,736,720	4,448,970	28.03	37.57	41.26	39.44	28.91	22.93	19.06
Cabai	1,569,100	1,183,000	1,237,110	1,290,470	1,345,440	1,401,480	1,458,620	1,516,870	-24.61	4.57	4.31	4.26	4.17	4.08	3.99
Lada (Kering)	3,855,000	4,321,862	4,537,955	4,764,853	5,003,095	5,253,250	5,515,913	5,791,708	12.11	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Sawit (TBS)	58,359,600	59,969,391	62,967,861	66,116,254	69,422,066	72,893,170	76,537,828	80,364,719	2.76	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Sapi	73,603	70,686	72,930	75,174	79,662	84,150	88,638	93,126	-3.96	3.17	3.08	5.97	5.63	5.33	5.06
Ayam	4,968,558	4,917,860	5,163,753	5,421,941	5,693,038	5,977,690	6,276,574	6,590,403	-1.02	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Rata-rata									2.22	10.05	10.61	10.78	8.95	7.89	7.19

Tabel Perhitungan Baseline dan Target Peningkatan Produktivitas (kg/ha)

Komoditas	Realisasi		Target						Peningkatan Produktivitas Tahunan						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Padi (GKG)	3.27	2.61	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	-20.11	14.84	3.33	3.23	3.12	3.03	2.94
Cabai	10.55	3.56	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	-66.26	40.45	2.00	1.96	1.92	1.89	1.85
Lada (Kering)	1036.42	970	1134.77	1191.51	1251.09	1313.64	1379.32	1448.29	-6.41	16.99	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Sawit (TBS)	12548.29277	12613.186	13243.84	13906.04	14601.34	15331.41	16097.98	16902.88	0.52	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Sapi	1.82	1.82	1.83	1.83	1.84	1.84	1.85	1.85	0.00	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
Ayam	10.18	14.00	14.25	14.50	14.74	14.99	15.23	15.48	37.53	1.79	1.72	1.69	1.67	1.64	1.61
Rata-rata									-9.12	13.22	2.89	2.86	2.83	2.80	2.78